



News Letter

BIRO UMUM DAN HUMAS
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Edisi 11/NL/11/2015

November 2015



**Untuk Tentukan Langkah
Strategis Kementan Gelar Rakornas**

Kementan Siap Hadapi MEA 2016

**Peran Penting Kelompok Tani Dalam
Capai Swasembada Pangan**



Untuk Tentukan Langkah Strategis Kementan Gelar Rakornas

03

Kementan Siap Hadapi MEA 2016

04

Peran Penting Kelompok Tani Dalam Capai Swasembada Pangan

05

Kementan Gelar Acara Bulan Mutu Pertanian 2015

07

Lampung Buktikan Kinerjanya Dengan Peningkatkan Produksi Padi

08

Pentingnya Kemandirian Benih Dalam Capai Swasembada Pangan

09

Capai Swasembada Pangan Melalui Modernisasi Pertanian

11

Kementan Akan Kembangkan Padi Hibrida Di NTT

12

Kementan Bantu Pembangunan Pertanian Aceh

14

Untuk Capai Swasembada Daging Kementan Terapkan Sentra Peternakan Rakyat

15

Untuk Penuhi Kebutuhan Daging Kementan Kerjasama dengan 6 Daerah Pemasok Sapi

16

Guna Memenuhi Kebutuhan Sapi Nasional Kementan Cek Kapal Khusus Angkut Ternak

18

Untuk Kelancaran Distribusi Sapi Kementan Lakukan Kesepakatan Dengan Pengusaha

19

Kementan Penuhi Kebutuhan Bawang Putih Dari Dalam Negeri

20

Untuk Angkat Citra Indonesia Kementan Gelar Festival Hortikultura 2015

22

Pengarah
Kepala Biro Umum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Penanggung Jawab
Ir. Marihot H. Panggabean, M.Si

Penyunting
Agus Sumantri, S.Sos

Pelaksana
Dra. Ria Satiti Irawati
Imam Santoso, SE

Anggota
Alice Raga Dewi, S.Sos
Ir. Rusman
Fajar Rahman, M.S.Ikom
Kurniawatisari, S.Sos

Distribusi
Makmur

Narasumber
Pejabat Kehumasan unit Eselon I
Lingkup Kementerian Pertanian



Untuk Tentukan Langkah Strategis Kementan Gelar Rakornas



"Kementerian Pertanian merasa perlu melakukan langkah dalam bentuk Rapat Kerja Nasional (Rakornas). Adapun tujuannya yakni untuk membahas kinerja Kementan selama setahun (2015), serta membuat langkah strategis Upaya Khusus (Upsus) 2016"



yakni untuk membahas kinerja Kementan selama setahun (2015), serta membuat langkah strategis Upaya Khusus (Upsus) 2016. Mentan mengapresiasi kepada semua stakeholder yang ikut menyukseskan Upsus Kementan tahun 2015.

"Rapat kerja nasional pada hari ini menjabarkan langkah evaluasi kinerja Kementan, selama setahun di 2015 yang kemudian mempersiapkan langkah strategis pada tahun 2016, Alhamdulillah berkat kerja keras dari teman-teman semua, kepala dinas kabupaten provinsi, kabupaten kota, Dandim, Danrem, dan Babinsa di semua daerah, kita membuah hasil yang Signifikan," kata Mentan.

Menurut Mentan, jika tidak ada Upsus dari pihak Kementan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengimpor beras secara besar-besaran pada tahun 2015. Mentan meyakini dengan dilakukannya UPSUS, semuanya bergerak cepat di lapangan sehingga tahun 2015, setahun pemerintahan Jokowi dan JK tidak ada impor beras.

"Yang ingin kita tegaskan dari September 2014 hingga September 2015, kita tidak impor beras, Saat ini kita menghadapi efek El Nino yang lebih besar. Kalau tidak ada UPSUS kita akan impor beras dalam jumlah yang jauh lebih besar dibanding tahun 1998. Kita berharap dalam Rakornas ini kita bisa menyusun sebuah strategi baru untuk memperkuat UPSUS di tahun 2016" kata Mentan

Lebih lanjut Mentan memaparkan capaian-capaian Kementan di antaranya telah terealisasi pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi ersier 1,56 juta hektare atau 52 persen dari target 3,0 juta hektare. Kementan telah sukses membangun seribu desa mandiri benih, lantas akan dilakukan pemantapan di 2016. Dilakukan pula pemantapan seribu desa organik dan cetak sawah seluas 23 ribu hektare.

Untuk membahas kinerja Kementerian selama satu tahun dalam periode Oktober 2014 - Oktober 2015. Kementerian Pertanian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Rapat tersebut diselenggarakan secara tertutup dan dibuka oleh Menteri Pertanian dengan memaparkan pencapaian sepanjang tahun, sekaligus mengkoordinasi perencanaan kegiatan 2016.

"Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo sesuai program pemerintahannya untuk memprioritaskan pangan, maka Kementerian Pertanian sangat optimis meraih target swasembada pangan akan tercapai dalam 2 tahun lagi". kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara Jakarta, (9/11)

Dalam acara Rakornas yang mengangkat tema "Modernisasi Pertanian Mendukung Percepatan Swasembada dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis", Mentan mengatakan Kementerian Pertanian tetap bersemangat untuk meraih target swasembada pangan dalam tiga tahun.

"Saat ini pemerintahan sudah berjalan satu

tahun, tak pernah surut walaupun tantangan dan kendala dilapangan cukup berat, Kita tetap selalu optimis target swasembada pangan bisa terwujud dengan adanya kemauan dan kerja keras dari semua pihak terkait," kata Mentan.

Mentan mengungkapkan upaya untuk meraih swasembada dilakukan dengan pembangunan irigasi yang rusak nya sampai 52%, mengatasi keterbatasan bibit unggul, distribusi pupuk yang belum tepat sasaran serta minimnya alat mesin pertanian. Swasembada pangan juga akan dicapai dengan mengerakkan semua elemen.

"Swasembada pangan dapat tercapai dengan adanya upaya perbaikan irigasi, distribusi pupuk yang harus diperbaiki, alsintan kita distribusikan ke petani, untuk merealisasikan cita-cita bersama menuju Swasembada pangan saat ini Kementan sudah menggandeng 51 Babinsa TNI, 8.600 mahasiswa, 20 ribu tenaga penyuluh, serta 950 ribu tenaga harian lepas. Semuanya kita gandeng," ungkap Mentan.

Mentan mengatakan, Kementerian Pertanian merasa perlu melakukan langkah dalam bentuk Rapat Kerja Nasional (Rakornas). Adapun tujuannya



Mentan juga menyebut tujuh komoditas utama pangan yang mengalami peningkatan produksi signifikan meliputi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi dan gula. Dari data yang ada Angka Ramalan (Aram) I 2015 pun meningkat dibandingkan Angka Tetap (Atap) 2014. Perbandingannya pada padi, Atap 2014 sebanyak 70,846 juta ton sedangkan Aram I 2015 75,5 juta ton..

“Untung jagung, Atap 2014 ditetapkan sebanyak 19 juta ton dan Aram 2015 sebanyak 20 juta ton. Kedelai pun mengalami peningkatan, dari 955 ribu ton di tahun lalu dan sekarang 999 ribu ton di Aram I 2015, prognosa produksi gula 2015 sebesar 2,72 juta ton atau meningkat 3,65 persen dibandingkan 2014 sebesar 2,63 juta ton. Begitu pun produksi daging karkas sapi dan kerbau 2015 diperkirakan 409 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat 5,23

persen dibanding 2014” papar Mentan.

Sedangkan guna memenuhi kebutuhan konsumsi daging domestik, Mentan menjelaskan Kementan akan mengembangkan sentra pembibitan dan penggemukan sapi pada lahan sejuta hektare oleh sembilan investor. Ia juga menyebut terjadi peningkatan produksi di sektor hortikultura.



Kementan Siap Hadapi MEA 2016

“Pihak Kementan telah mempersiapkan dengan baik sektor pertanian supaya dapat bersaing di Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Dengan perbaikan jaringan irigasi, penambahan alat mesin pertanian, perbaikan dalam pasca panen, hilirisasi pertanian, dan perbaikan tata niaga maka produk-produk pertanian Indonesia sudah semakin efisien dan berdaya saing”

Mulai 1 Januari 2016 nanti Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pihak Kementerian Pertanian optimistis hasil produksi pertanian dari Indonesia dapat bersaing dengan hasil produksi pertanian dari negara-negara Asia Tenggara lainnya pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pasar bebas regional Asia Tenggara itu direncanakan dimulai pada awal 2016.

“Sektor pertanian Indonesia akan mampu bersaing dalam perdagangan bebas regional, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maupun Trans Pacific Partnership (TPP). Kita harus siap, harus optimis. Kita ini negara besar, tanahnya subur, melimpah sumber daya alamnya,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat memberi Keterangan Pers di Kanpus Kementerian Pertanian (2/11).

Mengenai keinginan Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Trans-Pasific Partnership seperti yang dinyatakan Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke AS, pada 25-28 Oktober 2015 bahwa Indonesia berminat untuk bergabung dalam perdagangan bebas Trans-Pasific Partnership maka Mentan yakin Indonesia dapat berkompetisi pada komoditas pertanian dengan negara lain di Asia Pasifik.

Mentan mengungkapkan pihak Kementan telah mempersiapkan dengan baik sektor pertanian supaya dapat bersaing di Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Dengan perbaikan jaringan irigasi, penambahan alat mesin pertanian, perbaikan dalam pasca panen, hilirisasi pertanian, dan perbaikan tata niaga maka produk-produk pertanian Indonesia sudah semakin efisien dan berdaya saing.

“Pemerintah telah mempersiapkan tantangan ekonomi ini sejak awal pemerintahan, melalui optimalisasi faktor kunci produksi. Kita sudah menyiapkan untuk MEA dari sejak 1 tahun pemerintahan ini faktor kunci produksi sudah kita persiapkan. Irigasi, alsintan, pasca panen, hilirisasi, tata niaga kita sempurnakan,” ungkap Mentan.

Mentan mengatakan persiapan yang dilakukannya sudah membuahkan hasil, dimana ekspor bawang merah, kacang hijau, telur ayam, dan beras organik yang telah dilakukan Indonesia sebagai bukti kesiapan sektor pertanian Indonesia menghadapi perdagangan bebas. Pada tahun 2015, bawang merah, jagung, kacang, dan mangga hasil produksi petani Indonesia telah diekspor ke negara tetangga.

“Sekarang irigasi 2,6-3 juta hektar sudah diperbaiki, alsintan (alat mesin pertanian) meningkat sampai 80.000 unit. Optimalnya nanti di tahun 2016. kita harus siap,

harus optimis. Saat ini produk pertanian Indonesia sudah mulai mengekspansi pasar-pasar di negara tetangga. Sekarang kita sudah ekspor bawang merah, kacang hijau, telur ayam, beras organik. Ini menunjukkan ada peningkatan produksi dan produktivitas,” kata Mentan.

Menurut Mentan sampai saat sekarang Indonesia sudah ekspor bawang merah sebesar 5000 ton, yang awalnya direncanakan ekspor 20-30 ribu ton. Tidak hanya itu, ada juga ekspor kacang ijo, jagung dan ayam ke Myanmar. Mentan berharap agar produksi di tahun 2016 bisa melebihi produksi tahun 2015.

Dengan sejumlah perbaikan faktor-faktor produksi pada tahun 2015, Mentan sangat optimistis Indonesia tidak perlu lagi impor beras di 2016. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia memiliki cadangan beras nasional (CBN) yang setiap saat dapat dikurkuran kalau terjadi kekurangan beras di satu daerah.

“Kalau kita mau mengkalkulasi, dengan jumlah penduduk Indonesia pada saat ini yaitu sebesar 250 juta jiwa, maka impor secara normal itu bisa dilakukan oleh pemerintah sebesar 8,9 juta ton beras. Itu dilakukan untuk menghindari terjadinya inflasi. Tapi, untuk sampai saat ini kita belum melakukan impor beras” ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa beras yang menjadi komoditas konsumsi utama rakyat Indonesia hingga kini belum diimpor, sebelumnya Pemerintah hendak impor 20 ribu sampai 30 ribu ton. Produksi beras Indonesia diharapkan akan melonjak tahun depan sehingga tidak perlu impor lagi, bahkan bisa ekspor dalam jumlah besar ke berbagai negara.

"Saat Ini Indonesia ternyata telah mengekspor beras, terbukti beberapa waktu lalu sebanyak 134 ton beras organik dari Indonesia dikapalkan ke Italia. Beras organik yang diekspor ke Italia ini

diproduksi di Kabupaten Tasikmalaya Eksportirnya PT Bloom Agro. Selain Italia, Amerika Serikat dan Singapura juga akan mengimpor beras organik dari Indonesia" terang Mentan.

Hal serupa juga dikatakan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Hasil Sembiring dimana telah dilakukan ekspor beras organik ke Italia sebanyak 134 ton. Nilai tambah yang dihasilkan oleh beras organik tersebut sangat tinggi, harganya jauh lebih mahal dibanding beras medium dan beras premium. Ekspor beras organik itu akan terus ditingkatkan. Dengan adanya

program pengembangan 4.000 ha padi organik, produksinya akan terus bertambah.

"Di Eropa, harga beras organik asal Indonesia bisa dijual dengan harga 6 euro/kg...Harganya di Eropa sampai 6 euro/kg. Untuk itu pembelinya datang langsung dari Italia untuk melihat langsung proses produksinya, Diharapkan tahun depan bisa meningkat. Ini sesuai dengan program kita untuk pengembangan padi organik 4.000 ha tahun depan. Ini memberikan nilai tambah yang bagus" kata Dirjen Tanaman Pangan.

Peran Penting Kelompok Tani Dalam Capai Swasembada

"Kelembagaan Kelompok Tani memiliki peran penting untuk mendukung pencapaian swasembada pangan yang ingin dicapai dalam tiga tahun. menyatakan di tingkat pusat. KTNA, sebagai kelembagaan kelompok tani berperan nyata dalam membangun pertanian. KTNA berperan memberikan masukan pengambilan keputusan serta koordinasi. Sementara pada tingkat daerah berperan aktif mengawal pelaksanaan program pembangunan pertanian di lapangan"



Target pencapaian swasembada pangan dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo membutuhkan kelembagaan kelompok tani yang kuat, mengingat besarnya jumlah penduduk yang mencapai 252 juta jiwa itu membutuhkan pangan dalam jumlah besar. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengadakan acara Rempug dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sebagai langkah menyinergikan gairah berproduksi demi tercapainya target swasembada pangan Indonesia yang telah dicanangkan.

"Kelembagaan Kelompok Tani memiliki peran penting untuk mendukung pencapaian swasembada pangan yang ingin dicapai dalam tiga tahun. Saya harap kelembagaan kelompok tani dapat terus ditingkatkan kinerjanya. Caraya, dengan memperkuat jejaring kerjasama baik di level daerah, nasional maupun internasional agar dapat mempercepat pembangunan pertanian di Indonesia" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat acara Rempug Paripurna Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Tahun 2015 di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, (6/11).

Mentan menyatakan di tingkat pusat KTNA berperan memberikan masukan pengambilan keputusan serta koordinasi. Sementara pada tingkat daerah berperan

aktif mengawal pelaksanaan program pembangunan pertanian di lapangan.

"KTNA, sebagai kelembagaan kelompok tani berperan nyata dalam membangun pertanian. Saya mengharapkan agar saudara tidak henti-hentinya untuk selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerja guna memberikan layanan yang terbaik kepada para petani," kata Mentan.

Mentan menjelaskan pencapaian swasembada pangan atas tujuh komoditas pangan strategis itu sangat relevan dengan penduduk Indonesia yang bertambah 1,49% tiap tahunnya. Padahal, saat sekarang jumlahnya sudah mencapai 252 juta jiwa. Maka pemerintah ingin berfokus pada penanganan tujuh komoditas seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging dan gula.

"Guna memenuhi kebutuhan pangan nasional, maka target swasembada pangan hendaknya dapat dicapai dalam waktu yang cepat, yaitu dalam waktu tiga tahun. Sementara itu untuk komoditas pangan lainnya harus dilakukan percepatan peningkatan produksi secara nyata, sehingga impor terkendali" jelas Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa indikasi keberhasilan pembangunan pertanian telah terlihat. Hasil kerja keras semua pihak itu telah menunjukkan hasilnya. Berdasarkan Angka Ramalan II BPS, produksi padi tahun 2015 sebanyak

74,99 juta ton gabah kering giling (GKG) yang tahun lalu hanya 70 juta ton atau mengalami kenaikan sebanyak 4,15 juta ton (5,85%).

"Ada kenaikan Produksi 4 juta ton mengindikasikan pasokan beras kita lebih cukup dibandingkan dari 2014. Produksi jagung, kedelai dan pangan pokok lainnya juga mengalami peningkatan. Kerja keras petani patut kita hargai dengan cara membeli produk dari petani kita sendiri. Bulog sudah saya instruksikan untuk secara maksimal menyerap gabah/beras petani," terang Mentan.

Mentan memaparkan pemerintah bergerak cepat mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan masalah pertanian guna mengatasi kebutuhan pangan di Indonesia dan mencapai swasembada pangan, serta menyelesaikan masalah utama, yakni irigasi yang rusak sekitar 52 persen di seluruh Indonesia, kemudian memperbaiki benih unggul terbatas, distribusi pupuk yang belum tepat sasaran, kurangnya alat dan mesin pertanian, serta masalah tenaga penyuluh.

"Sejak dilantik menjadi Menteri Pertanian, saya langsung menghubungi Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir untuk melakukan diskusi membahas masalah sektor pertanian, sedangkan masalah regulasi





yang menghambat pembangunan pertanian misalnya pengadaan benih yang dahulu pengadaannya dengan cara tender, kini atau mulai 2014. Presiden telah membuat Pepres sehingga masalah pertanian disesuaikan regulasinya” papar Mentan.

Mentan mengatakan setelah mengeluarkan kebijakan yang akan dilakukan kemudian menangani faktor-faktor produksi yang menjadi kunci antara lain irigasi mengalami kerusakan berkisar 52% seluruh Indonesia karena selama 20 tahun tidak ada perbaikan.

“Presiden memberikan target untuk menyelesaikan masalah irigasi selama tiga tahun dengan satu juta hektare per tahun. Dan, ternyata hingga satu tahun ini, sudah dua juta hektare dapat diselesaikan. Anggaran tahun ini sebanyak 2,6 juta hektare dengan APBN dan 700 ribu hektare (DAK)”kata Mentan.

Mentan menuturkan dalam masalah pupuk, pihak Kementan sudah mengunjungi 300 daerah kabupaten di Indonesia selama enam bulan tidak ada keluhan kecuali Gunungkidul (DI Yogyakarta) dan Sulawesi Tenggara yang masih ada masalah. Masalah pupuk yang sering terlambat tersebut salah satunya dengan cara penegakan hukum yakni kerja sama dengan Polri, dan hasilnya sekitar 40 pelaku masuk penjara.

Terkait masalah Penyuluh, Mentan mengaku kekurangan tenaga penyuluh pertanian 39.180 orang. Kekurangan tenaga penyuluh ini dapat mengancam realisasi target pemerintah dalam program swasembada pangan. Berdasarkan data di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan, jumlah penyuluh pertanian di Indonesia saat sekarang 47.412 orang. Penyuluh pertanian sebanyak itu tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kekurangan tenaga penyuluh sudah lama, akibat banyak penyuluh pertanian yang memasuki masa pensiun. Padahal mengacu pada UU

No 19/2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, setiap desa pertanian di daerah minimal harus ada satu orang penyuluh pertanian untuk mengawasi lahan pertanian seluas 100 hektare.

“Saat ini, tercatat 71.479 desa pertanian dari sekitar 84.000 desa di Indonesia dengan luasan lahan berbeda - beda. Melihat luasan lahan pertanian di Indonesia sekarang bisa dikatakan kekurangan 39.180 orang tenaga penyuluh pertanian. Dikhawatirkan, Jika tidak ada penambahan jumlah tenaga penyuluh pertanian akan mempengaruhi hasil panen dan luasan lahan pertanian di Indonesia akan berkurang. Dari tenaga penyuluh pertanian yang ada sekarang 27.159 orang status PNS. Sedang 20.259 orang tenaga harian lepas (THL). Diprediksi kalau sampai tidak ada penambahan jumlah tenaga penyuluh pertanian dalam waktu dekat pada 2019 jumlah penyuluh pertanian Indonesia tinggal tersisa sebanyak 49 persen” ujar Mentan.

Mentan juga menjelaskan masalah tenaga penyuluh yang masih lemah dan jumlahnya hanya 27.000 orang dengan usianya rata - rata 50 tahun ke atas, meski semangatnya luar biasa tetapi di lapangan stamina berkurang. Sehingga kekurangan sekitar 43 ribu orang tenaga penyuluh. Tetapi Mentan merasa lega setelah pemerintah pusat merencanakan merekrut tenaga penyuluh pertanian swadaya 10.000 orang tahun depan. Pengisian kekurangan tenaga penyuluh diutamakan dari anggota KTNA yang terbukti sudah memiliki komitmen terhadap pembangunan pertanian.

“Tetapi tidak semua anggota KTNA bisa mudah masuk menjadi tenaga penyuluh pertanian pada tahun depan. Seleksi ketat dan memberikan pelatihan yang cukup sebelum mendampingi petani akan tetap diberlakukan. Pemerintah akan merekrut 10.000 tenaga penyuluh pertanian swadaya untuk mengawal produktivitas tujuh komoditas utama pertanian pada 2016. Penyuluh pertanian swadaya tersebut nantinya akan melengkapi

tugas 27.000 penyuluh pertanian berstatus pegawai negeri sipil dan 20.300 tenaga harian lepas penyuluh pertanian” jelas Mentan.

Tentang keterlibatan personel TNI sebagai tenaga penyuluh pertanian, Mentan menegaskan peran TNI terbatas sebagai tenaga pendukung dan mendinamisasikan petani. Jadi, TNI tidak mengambil alih tugas penyuluh pertanian. Dukungan TNI sangat bisa dirasakan petani, baik untuk pembangunan irigasi maupun membasmi hama.

“Atas petunjuk Presiden kemudian dibantu dengan anggota TNI sebagai tenaga penyuluh di lapangan. Selain itu, dukungan anggota KTNA sekitar puluhan ribu orang di seluruh Indonesia sehingga kita mampu meningkatkan produksi pangan dan diharapkan Indonesia tidak lagi melakukan impor “ tegas Mentan.

Mentan menyatakan Indonesia dalam satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK tidak ada impor beras. Padahal, sejumlah daerah menghadapi tantangan musim kemarau panjang atau elnino intensitas kenaikan kekeringan sekitar 2,35% tertinggi sepanjang sejarah. Jika tidak terjadi elnino di sejumlah daerah di Indonesia terutama lumbung padi produksinya akan melimpah dan ada kemungkinan sudah bisa ekspor beras ke negara lain.

“Kita sudah ekspor beras ketan sebanyak 134 ton, kacang hijau 60 ribu ton, jagung 400 ribu ton, bawang merah sebelumnya harga Rp35 ribu per kg, tetapi kini sudah Rp6.000 per kg hingga Rp7.000 per kg. Hasil komoditas padi, jagung, kedelai produksinya naik. Bawang pada awalnya mau impor ternyata kini justru ekspor. Jagung juga di ekspor sekitar 400 ribu ton dengan total rencana 4,6 juta ton tahun ini.” ujar Mentan.

Menurut Mentan, bawang dari daerah centra seperti Brebes dan Bima telah di distribusikan ke daerah daerah sehingga mampu menekan harga pasar, di Kabupaten Temanggung Jateng, tanam seluas 3.000 hektare bawang putih, sekarang akan menanam 20 ribu hektare. Sehingga, komoditas bawang putih tidak ada impor dan dapat mendistribusi. Jika impor tidak dikendalikan akan berbahaya bagi petani.

Dalam acara itu, Mentan menerima lencana Adi Bakti Tani Nelayan Utama yang disematkan Ketua Umum KTNA Winarno Thohir atas perannya membangun pertanian nasional karena Kebijakan Mentan yang dinilai berani dan banyak melakukan terobosan kebijakan. Bahkan Mentan kerap langsung mengambil inisiatif dan terjun kelapangan, misalnya mengatasi persoalan kekeringan.



Kementan Gelar Acara Bulan Mutu Pertanian 2015

"Acara Bulan Mutu Pertanian 2015 bertujuan untuk memberikan kesadaran dan penghargaan masyarakat konsumen terhadap produk aman dan bermutu dengan membeli produk berregistrasi dan bersertifikasi, serta mendorong pelaku usaha agribisnis untuk menerapkan sistem jaminan mutu agar mampu menghasilkan produk sesuai standar".



harus dilakukan yaitu Pertama, mekanisme pendaftaran/registrasi produk pangan segar sesuai Permentan No. 51/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Asal Tumbuhan (PSAT). Kedua, mekanisme sertifikasi mutu dan keamanan pangan PSAT sesuai Permentan No.20/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian. Ketiga, mekanisme sertifikasi organik sesuai dengan Permentan No.64/2013 tentang Sistem Organik.

Mentan menjelaskan Kementan berkewajiban melakukan pengawasan case by case/emergency untuk merespon bisa ada isu keamanan pangan dimasyarakat. Untuk produk yang akan diekspor harus ada jaminan mutu yang bagus melalui pengawasan yang ketat. "Sertifikasi keamanan dan mutu pangan haruslah terjaga dan konsisten, ketentuan persyaratan tersebut juga harus sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu, Permentan No. 51/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Asal Tumbuhan (PSAT). PSAT yang telah mendapat nomor registrasi Produk Dalam (PD), dinyatakan memenuhi syarat keamanan pangan.

"Langkah ini kami lakukan sesuai amanat undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dimana pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan. Hingga saat ini sudah ada komoditi sebanyak 600 jenis produk yang meliputi beras, buah dan sayuran segar, kacang-kacangan, rempah dan biji-bijian yang telah mendapat nomor registrasi Produk Dalam (PD) serta dinyatakan memenuhi syarat keamanan pangan dan telah diregistrasi oleh OKKP (otoritas kompeten keamanan pangan)," kata Mentan.

Sesuai amanat UU No.8 Tahun 2012 tentang Pangan, Negara selain berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan pangan juga untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, memiliki kewajiban mewujudkan ketersediaan pangan dan pemenuhan konsumsi pangan yang aman dan bermutu bagi rakyat Indonesia.

"Selain menetapkan norma, standar dan prosedur keamanan pangan, Pemerintah pusat dan daerah harus menjamin penyelenggaraan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pada setiap rantai pangan secara terpadu," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat memberi sambutan pada pembukaan Acara Bulan Mutu Pertanian 2015 di area Candi Bentar Taman Mini Indonesia Jakarta, (8/11).

Menurut Mentan, acara Bulan Mutu Pertanian 2015 yang tengah digelar pihak Kementan, bertujuan untuk memberikan kesadaran dan penghargaan masyarakat konsumen terhadap produk aman dan bermutu dengan membeli produk

berregistrasi dan bersertifikasi, serta mendorong pelaku usaha agribisnis untuk menerapkan sistem jaminan mutu agar mampu menghasilkan produk sesuai standar. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap produk-produk bermutu (quality awerness) harus terus ditumbuh kembangkan oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait agar produk-produk bermutu semakin mendapatkan penghargaan yang layak oleh konsumen.

"Jadi keberhasilan penerapan standarisasi ini, tidak hanya semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah dan produsen saja, tetapi juga menuntut peran aktif pelaku pasar mulai dari pedagang skala kecil, menengah dan besar, baik tradisional maupun modern (retail), sedangkan gelar produk-produk hasil pertanian bersertifikat dan beregistrasi ini diharapkan dapat mempromosikan produk pertanian bermutu agar semakin dikenal oleh khalayak. Apalagi melalui even ini juga dihadiri pelaku retail, sehingga dapat menghasilkan banyak kesepakatan pemasaran antara pelaku usaha dengan retail," kata Mentan.

Terkait upaya untuk menjaga keamanan pangan produk pertanian segar, Mentan memaparkan ada tiga mekanisme yang



Pada acara tersebut, Mentan juga meminta petani dan industri pangan terkait untuk mengembangkan potensi beras organik Indonesia. Dengan adanya potensi beras organik, kualitas ekspor sektor pertanian Indonesia menjadi lebih terbuka dan berkualitas, apalagi diberi harga yang lebih tinggi. Pasar Eropa juga lebih terbuka dengan organik

“Jika dihitung, beras organik berpotensi menghasilkan triliunan rupiah. Beras biasa harganya Rp 8 ribu per kg tetapi yang jenis organik Rp30 ribu per kg, artinya 300 persen lebih tinggi, Produksi beras Indonesia, rata-rata 45 juta ton tiap tahun, 1 juta atau 2 juta kenaikan, kalau harganya naik sampai Rp20 ribu, maka keuntungan Rp40 triliun yang akan dinikmati petani” kata Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Gatot Irianto mengatakan untuk mendorong pengembangan pertanian organik, Kementan akan memaksimalkan



penggunaan pupuk organik sebagai komposisi utama dalam menyuburkan tanaman bagi petani-petani daerah di Indonesia yang telah banyak menggunakan pupuk anorganik.

“Pemakaian pupuk anorganik di berbagai daerah sering berlebihan, namun fungsi dari pupuk organik jarang dimaksimalkan, padahal kita punya banyak sampah organik di Indonesia,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Lampung Buktikan Kinerjanya Dengan Peningkatan Produksi Padi

Oleh Menteri Pertanian JKI



“Lampung merupakan daerah terdampak kemarau cukup parah akibat El Nino, namun sebuah prestasi luar biasa masih ada sawah yang bisa panen di tengah musim kemarau panjang dan pengaruh El Nino, Lampung masih berhasil melakukan panen raya seluas 33.000 ha varietas Ciherang. Hal ini membuktikan bahwa persediaan beras di Lampung cukup”

Kinerja tanam padi di wilayah Provinsi Lampung mengalami peningkatan untuk meningkatkan produksi. Dari lahan tanaman padi seluas 656.023 hektare pada 2014 meningkat menjadi 714.661 ha pada 2015. Kementerian Pertanian mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Lampung beserta berbagai pihak terkait yang membantu terwujudnya peningkatan produksi pertanian di sejumlah wilayah. Lampung merupakan daerah terdampak kemarau cukup parah akibat El Nino, namun sebuah prestasi luar biasa masih ada sawah yang bisa panen. Petani di Lampung Timur ternyata masih bisa menyelamatkan panen padi di tengah kemarau panjang.

“Berkat kerja keras Bapak Ibu sekalian, masih bisa menyelamatkan panen padi di Lampung ini. Padahal El Nino terkuat sepanjang sejarah yang kita alami tahun ini, Lampung termasuk daerah kekeringan yang sangat tinggi. Mirip dengan Jawa Barat. Namun, di tengah musim kemarau panjang dan pengaruh El Nino, Lampung masih berhasil melakukan panen raya seluas 33.000 ha varietas Ciherang. Hal ini membuktikan bahwa persediaan beras di Lampung cukup. Ini berkat kerja sama kita semua,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat usai melakukan panen raya padi di di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur (11/11).

Mentan menjelaskan ada tujuh keunggulan padi yang dipanen saat kemarau. Pertama, loses rendah. Risiko

kehilangan panen rendah karena tidak ada angin atau hujan. Kedua, serangan hama rendah hampir tidak ada, ketiga bakteri tidak bisa tumbuh. Keempat, padi yang dipanen bisa langsung masuk gilingan karena sudah kering, Kelima fotosintesis berlangsung sempurna, Keenam, padi mudah dipanen karena ringan dan kering. Ketujuh, harga tinggi karena lahan lain sudah panen lebih dulu.

“Kualitas produksi padi bakal bagus di musim kemarau. Hari ini Alhamdulillah ada panen di tengah El-Nino kuat, terkuat sepanjang sejarah. Ini sekitarnya kering. Irigasi tersier baru dibangun. Meskipun musim kemarau hasil panen di Kecamatan Jabung masih terbilang bagus, yaitu bisa menghasilkan 8 ton padi dalam satu hektarnya. Sedangkan November ini Jabung siap melakukan panen raya seluas

709 hektar dari jumlah sawah yang ada 6.230 hektar. Kami harap musim rendeng ini semua petani Lampung Timur bisa menghasilkan panen yang lebih maksimal," jelas Mentan.

Menyinggung soal impor beras, menurut Mentan rencananya akan impor 9 juta ton. tetapi dalam setahun terakhir ternyata Indonesia mampu bertahan tanpa impor beras, dengan membentuk Penanggung Jawab Upaya Khusus (Upsus). Kalau tidak ada El Nino, Indonesia justru bisa ekspor. Disamping itu nilai tukar petani (NTP) naik. Padahal, saat sekarang Indonesia sedang dilanda El-Nino.

"Naiknya NTP seperti tak mungkin. Tetapi kenapa bisa hal ini terjadi? Ini karena adanya fungsi kontrol impor yang ketat. Kenaikan NTP merupakan multiplier efek ketatnya kontrol impor. Pemerintah, tegas Amran, ingin mengangkat harga jual petani di atas breakeven point. Posisi ini membuat petani tak lagi butuh bantuan. Petani dinilai bisa membeli benih dan traktor sendiri" kata Mentan

Lebih lanjut Mentan menegaskan bahwa bagi petani yang terpenting adalah harga yang menguntungkan. Kenaikan NTP memiliki dampak sosial terkait generasi

penerus petani. Petani yang mengalami kerugian dan kecewa tak bisa 'mencetak' anak-anak yang berkeinginan menjadi petani. Untuk itu Kementerian Pertanian juga sudah memiliki strategi soal ini. Sekitar 8.700 sarjana akan dikirim pelatihan dan turun ke sawah.

"Mereka akan sudah bangga karena bisa menelpon sambil bertani. Inilah yang harus kita dorong, agar pertanian menuju ke era modern. Jika strategi ini berhasil berhasil maka petani akan tersenyum. Anak-anak para petaninya juga akan senyum dan termotivasi untuk jadi petani berdasi, Negara ini pada akhirnya akan memperoleh generasi pengganti. Tak ada lagi anak-anak yang enggan turun ke sawah" tegas Mentan.

Terkait kinerja Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Pertanian RI telah memberikan sejumlah penghargaan berupa Penghargaan, penghargaan untuk Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Penghargaan untuk Kepala Dinas Kabupaten Mesuji, Penghargaan untuk penyuluh pertanian di Kabupaten Lampung Timur. Selain itu penghargaan untuk mahasiswa pendamping UPSUS yang bertugas di Kecamatan Gading Rejo

Kabupaten Pringsewu.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Gubernur Bachtiar Basri menjelaskan dalam mendorong peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai di Provinsi Lampung, pemerintah daerah telah melakukan pola tanam dengan cara mengurangi debit air. Dari semula 1,9 liter/detik/hektare menjadi 1,5 ltr/dtk/ha. Sehingga beberapa wilayah irigasi yang semula tidak mendapat jatah air di musim Gadu MT 2015, dapat melakukan aktivitas budi daya padi dengan baik.

"Selain itu, dalam meminimalisasi dampak kemarau panjang dan El Nino tahun ini di beberapa wilayah bagi pertanaman padi yang tidak mendapatkan pasokan air, dilakukan penyiraman dengan bantuan mobil pemadam kebakaran. Hal ini efektif untuk menekan gagal panen. Selain itu juga menyiapkan sumur bor dan pompa air," jelas Wagub Lampung.

Wagub Lampung juga menambahkan Pemprov Lampung siap mendukung terwujudnya swasembada padi, jagung, kedelai, juga cabai dan bawang merah. Target peningkatan produksi padi menjadi 1 juta ton pada 2016.

Pentingnya Kemandirian Benih Dalam Capai Swasembada Pangan

"Padi hibrida Bernas Prima 3 dan Super 2 merupakan benih padi nasional yang diproduksi PT Sumber Agro Semesta, Ini memperluas harapan bagi tercapainya kedaulatan pangan dengan kemandirian benih. Dengan konsistensi memproduksi benih dalam negeri maka akan mengurangi ketergantungan benih impor sehingga kedaulatan pangan tercapai seutuhnya"



Pemerintah menyadari untuk tercapainya swasembada pangan harus didukung dengan swasembada benih. Keduanya memang memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu Pemerintah bertekad akan konsisten memproduksi benih dalam negeri dengan begitu akan mengurangi ketergantungan benih impor.

"Dengan konsistensi memproduksi benih dalam negeri maka akan mengurangi ketergantungan benih impor sehingga

kedaulatan pangan tercapai seutuhnya sesuai dengan Nawacita pemerintahan Jokowi-JK," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat usai melaksanakan panen raya padi hibrida jenis Bernas Prima 3 dan Super 2 di kawasan pertanian PT Sanghyang Sri, Subang (20/11).

Dalam acara panen raya yang dihadiri oleh para pejabat lingkup Kementerian Pertanian, jajaran pimpinan AGP dan AGN, pimpinan PT Sang Hyang Seri (PT SHS), Manajemen PT Sumber Agro Semesta (PT SAS), serta para petani setempat, Mentan

mengungkapkan benih Bernas Prima 3 dan Super 2 sangat memuaskan karena hasilnya sangat luar biasa mencapai 10,4 ton per hektare walaupun di musim kemarau. Bahkan, bila dimusim hujan, hasilnya bisa mencapai 12 ton per hektare.

"Padi hibrida Bernas Prima 3 dan Super 2 merupakan benih padi nasional yang diproduksi PT Sumber Agro Semesta, Ini memperluas harapan bagi tercapainya kedaulatan pangan dengan kemandirian



benih. Salah satu yang bisa meningkatkan produksi padi nasional 5,5 juta ton pertahun adalah padi jenis hibrida seperti ini, Teknologi benih padi hibrida dapat meningkatkan potensi hasil panen gabah lebih tinggi dari 30 persen dibanding benih varietas inbrida yang biasa ditanam petani” ungkap Mentan.

Terkait kemungkinan terjadinya El Nino pada awal 2016, maka Mentan memaparkan strategi yang diambilnya menghadapi adalah mempercepat tanam untuk daerah - daerah yang berada di sebelah utara khatulistiwa yaitu daerah yang berada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera.

Lebih lanjut Mentan mengatakan akan menginstruksikan kepada jajarannya di kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk mulai menanam padi, karena sekarang sudah memasuki musim hujan, sehingga menjadi saat yang tepat untuk tanam.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BMKG yang menyatakan kini di seluruh Indonesia sudah merata memasuki musim hujan, Berdasarkan informas dari BMKG tersebut, Kementan mengeluarkan instruksi kepada para petani untuk mulai menanam padi”kata Mentan.

Kepada para petani, Mentan memberikan semangat agar petani terpacu untuk mengerek naik produktivitas padi. Mentan berharap agar para petani mulai mengupayakan langkah-langkah berupa

percepatan tanam bibit padi terutama memasuki musim hujan tahun 2015.

Bahkan Mentan mengaku juga sudah membuat surat resmi kepada semua bupati di seluruh Indonesia untuk segera melakukan percepatan tanam. Saat sekarang diupayakan percepatan tanam yang dilaksanakan di Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Untuk di Aceh saja ada 100 ribu ha di satu wilayah, ada percepatan tanam.

“Kementan sudah berkoordinasi dengan seluruh bupati untuk segera mempercepat proses tanam. Kami sudah membuat surat resmi kepada semua Bupati yang ada di seluruh Indonesia untuk segera melakukan langkah percepatan tanam. Karena sudah masuk musim hujan. kami telah melakukan koordinasi dengan pihak BMKG. Musim hujan saat ini sudah merata di seluruh Indonesia dan upaya percepatan tanam harus dimulai sekarang. Semua petani di Indonesia agar meningkatkan dan mempercepat proses tanam, lahan yang ada segera ditanami jangan dikasi istirahat. Ditanam, panen, tanam begitu seterusnya” ujar Mentan.

Mentan mengatakan daerah yang terselamatkan karena sudah masuk musim hujan adalah daerah di Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Saat sekarang sudah ada lahan standing crop seluas 3,5 juta hektar. Para petani harus mempercepat tanam di bulan oktober dan november karena Mentan meyakini tanaman selamat dan di

panen pada bulan Februari.

“Untuk daerah-daerah di sebelah utara Khatulistiwa, musim kemarau panjang seperti kemarin merupakan rahmat, karena daerah pasang surut itu justru bisa ditanami pada musim kemarau, karena areal pasang surut tersebut bisa ditanami padi pada musim kemarau kemarin, ada peningkatan areal tanam seluas 283.000 ha” kata Mentan.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Kontak Tani Andalan (KTNA) Kabupaten Subang Otong Wiranta menerangkan bahwa Desa Ciberes merupakan salah satu daerah yang dilakukan percepatan tanam karena air buangan dan sebagainya bisa dimanfaatkan. kegiatan tersebut adalah percepatan masa tanam dengan memanfaatkan air dari Citarum timur yang dialirkan melalui saluran irigasi tersier.

“Karena hujan baru sekali dua kali saja. maka hanya air-air buangan, yang dimanfaatkan oleh petani sehingga bisa dipercepat itu tanam, sawah yang dipercepat tanamnya masih sekitar 250-300 hektar. Nantinya padi sudah dapat dipanen bulan Februari tahun 2016 mendatang. Produksi padi normal tujuh sampai delapan ton per hektar dan diperkirakan panen pada akhir Januari hingga awal Februari 2016” kata Ketua KTNA.



Capai Swasembada Pangan Melalui Modernisasi Pertanian



“Berbagai upaya yang dilakukan secara bersama-sama antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat maka program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah akan tercapai. Apalagi dengan bantuan benih unggul, jaringan irigasi yang baik, dan modernisasi alat pertanian”

Sebagai dukungan upaya khusus swasembada pangan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama dengan unsur SKPD dan Forkompinda melakukan panen raya jagung sebagai salah satu hasil pertanian di Pedukuhan Girinyono Desa Sendangsari Pengasih Kulon Progo, (4/11).

Dalam panen itu, hadir anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bupati Kulon Progo dan Kepala Dinas Pertanian Kulon Progo serta Kelompok Tani Subur Raharjo dari Girinyono, Sendangsari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Mentan mengatakan, sebagai upaya mewujudkan program swasembada pangan maka alokasi anggaran yang diberikanpun semakin ditingkatkan. Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih pada Sektor Pertanian. Sektor Pertanian di Yogyakarta telah dibantu oleh Pemerintah Pusat sekitar Rp 340 Milyar lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 178 Milyar.

“Khusus Kulon Progo mendapatkan kenaikan cukup signifikan dari Rp 13 Milyar menjadi Rp 99 Milyar. Selain itu, pada 2016, anggaran khusus pertanian Rp 100 triliun dari Rp 235 triliun yang dianggarkan. Kami setiap tahun memberikan alat pertanian, benih padi, subsidi pupuk dan perbaikan irigasi. Kami menargetkan perbaikan irigasi sepanjang

satu juta hektare per tahun,” kata Mentan.

Pada 2014 anggaran pertanian DIY sebesar Rp 178 miliar, kemudian 2015 naik menjadi Rp 340 miliar, atau naik hingga 200 persen. Mentan berjanji akan meningkatkan alokasi pengembangan pertanian di Kabupaten Kulon Progo, bila produktivitas pertanian dapat melampaui surplus di atas lima persen pada 2015.

“Anggaran pertanian dari Kementerian Pertanian untuk kabupaten Kulon Progo adalah Rp 13 miliar. Alokasi anggaran pada 2016, anggarannya minimal sama dengan 2015 bila mencapai target surplus lima persen. Kalau melebihi lima persen, maka kami akan lebih ditingkatkan lagi dari tahun sebelumnya,” janji Mentan.

Lebih lanjut Mentan menegaskan bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan secara bersama-sama antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat maka program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah akan tercapai. Apalagi dengan bantuan benih unggul, jaringan irigasi yang baik, dan modernisasi alat pertanian.

“Saya yakin dengan modernisasi alat pertanian, program swasembada pangan pemerintah akan tercapai. Saat ini target pemerintah menurunkan biaya produksi dengan menggunakan modernisasi alat pertanian kemudian meningkatkan

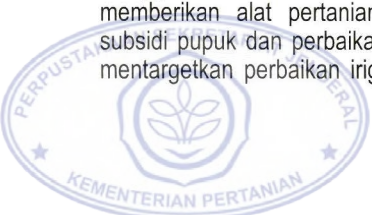
indek pertanaman dan meningkatkan produktivitas. Ini sasaran pemerintah tegas Mentan.

Mentan mengatakan biaya produksi pertanian mengalami penurunan sebesar 30 hingga 40 persen dengan adanya modernisasi alat pertanian. Kementerian Pertanian meningkatkan pemberian alat pertanian kepada petani seluruh Indonesia, bahkan peningkatan pemberian alat pertanian lebih dari 200 persen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Mentan mengatakan, indeks pertanian sangat baik. Hal itu didukung dengan pemberian benih unggul dan harga bagus mendorong peningkatan pendapatan petani.

“Petani tidak hanya membutuhkan alat pertanian seperti traktor, tapi membutuhkan kepastian harga. Kalau petani rugi, itu menjadi virus paling berbahaya, tapi kalau petani untung, mereka bersemangat dan pembangunan perdesaan akan semakin maju dan berkembang,” kata Mentan.

Mentan menerangkan semula diperkirakan produksi jagung daerah ini akan turun menjadi 25.000 ton lantaran dampak perbaikan irigasi yang cukup lama serta kemarau panjang ternyata produksi jagung di Kulonprogo tahun 2015 hingga bulan November mampu mencapai 29.000 ton.



"Hasil produksi panen jagung di Kulon Progo kali ini meningkat. Bahkan harganya mencapai Rp 3.000 per kilogram (kg). Harganya tentu menggembirakan bagi para petani, dua bulan yang lalu hanya Rp 1.500 per kg. Petani butuh harga yang wajar untuk melanjutkan produksi," terang Mentan.

Mentan mengatakan dengan harga jual produksi pertanian yang terus membaik akan berdampak pada membaiknya pendapatan yang diperoleh petani. Seperti jagung di Kulonprogo yang harga jualnya mencapai Rp 3.000 per kilogram lebih.

"Dengan harga sebesar itu, pendapatan petani sebenarnya setara atau melebihi penghasilan seorang menteri. Di Kulonprogo, petani jagung dengan satu hektar lahan, bisa mendapat keuntungan Rp 20 juta" kata Mentan.

Kepada Bupati Kulon Progo, Mentan meminta agar harga jagung dijaga dan jangan ditinggikan lagi dengan pertimbangan menjaga keseimbangan. Harga jagung saat sekarang Rp 3000 per kg.

"Saya minta bupati Kulon Progo dapat menjaga harga jagung, jangan terlalu tinggi. Rp 3000 itu sudah harga yang pantas dan bagus," pinta Mentan.

Mentan menuturkan tahun 2015 Indonesia sudah ekspor jagung 400 ribu ton sehingga jangan tanyakan masalah impor, sebab impor itu memperlemah negara Indonesia tapi memperkuat petani negara lain. Selain itu lantaran upaya pemerintah yang berhasil mengendalikan impor maka harga jagung menjadi stabil.

"Contohnya produksi kedelai di Yogyakarta semakin hari semakin turun. Di Jogja dulu

ada 60.000 hektare (ha) lahan kedelai sekarang tinggal 20.000 ha karena impor tidak terkendali. Maka kita berupaya untuk mengendalikan impor supaya harga tetap berada di atas BEP (Break Even Point)," tutur Mentan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan sebagai dukungan swasembada pangan, Pemkab Kulon Progo juga sudah melakukan beberapa program daerah. Program tersebut antara lain kerjasama dengan Bulog untuk mengganti Raskin menjadi Rasda, Pembelian beras oleh PNS, dan beberapa program lainnya.

Saat sekarang juga terus dilakukan upaya cetak sawah baru, agar produksi padi tetap tinggi. Bahkan beliau berharap, kedepan kebutuhan Beras di Kota Yogyakarta dapat disuplai dari Kulon Progo sehingga dapat mengurangi kemiskinan di Kulon Progo.



Kementan Akan Kembangkan Padi Hibrida Di NTT

"Pengembangan padi hibrida di NTT sangat penting untuk mendorong produksi padi nasional. Potensi penanam padi hibrida di NTT masih bagus. Untuk pengembangan padi hibrida dilakukan lewat program gerakan penerapan program tanaman terpadu seluas 2.000 ha di dua kecamatan yakni kecamatan Lembor seluas 1.500 ha dan Lembor Selatan seluas 500 ha"

Kementan Pertanian berencana daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai basis pengembangan padi hibrida. Pengembangan benih padi hibrida dinilai dapat mendorong peningkatan produksi padi di Indonesia karena tingginya tingkat produksi padi jenis tersebut. Pengembangan padi hibrida telah dilakukan di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kementan sudah menyediakan anggaran sekitar Rp 300-an miliar untuk program pengembangan sawah seluas 30.000 hektare (ha) di NTT.

"NTT masih kekurangan 100 ton beras untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah NTT, agar segera atasi dalam waktu dua sampai tiga tahun kedepan. Saya sudah diskusi dengan gubernur dan tahun depan akan membangun sawah 30 ribu hektar untuk pembangunan sawah di NTT, semua didanai pemerintah pusat," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, saat usai



melakukan panen raya padi hibrida di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (17/11).

Dalam panen raya itu hadir juga anggota DPD asal NTT, Gubernur NTT, Kasrem 161/WS, Kasiter, Dandim Ruteng, Kapolres Mabar, Pimpinan SKPD Kabupaten Mabar, Pimpinan SKPD Kabupaten

Manggarai, serta sejumlah pejabat Provinsi NTT.

Menurut Mentan, pengembangan padi hibrida di NTT sangat penting untuk mendorong produksi padi nasional. Selain akan menambah anggaran lebih dari Rp 300-an miliar untuk pengembangan sawah, Mentan juga menjanjikan bantuan sebesar 1 juta ha benih padi dan bantuan

alat sistem pertanian di NTT. Sedangkan adanya isu penyempitan lahan sawah akibat pembangunan pemukiman, Mentan meminta pemda setempat untuk menghentikannya.

“Program pengembangan 30.000 ha ini akan dimasukkan dalam lelang pengadaan sawah baru tahun ini, pengembangan lahan sawah itu dilakukan karena tingkat produktivitas pabrik hibrida di daerah ini mencapai rata-rata 10,4 ton per ha. Volume tersebut tergolong cukup tinggi bila dibandingkan produktivitas padi biasa di daerah ini yang sekitar 5 ton per ha atau 6 ton per ha. Paling tinggi produktivitas padi biasa 7 ton per ha” ujar Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kabupaten Manggarai Barat, Anggalinus Gapul memaparkan di daerah Lembor terdapat seluas 3.483 ha yang sudah siap panen saat sekarang. Dari jumlah tersebut sebanyak 390 ha dimana 100 ha di antaranya adalah padi hibrida.

“Rata-rata produksi padi hibrida ini sebesar 10,4 ton per ha atau lebih tinggi dari produksi rata-rata padi biasa sebesar 7 ton per ha. Sebenarnya ada juga padi hibrida yang produksinya sebesar 11 ton hingga 12 ton per ha,” papar Kadinas Manggarai Barat.

Kadinas Manggarai Barat menjelaskan pihaknya melakukan pengembangan padi terutama di lahan basah fungsional dan di lahan sawah tadah hujan seluas 5.000 ha. Untuk pengembangan padi hibrida dilakukan lewat program gerakan penerapan program tanaman terpadu seluas 2.000 ha di dua kecamatan yakni kecamatan Lembor seluas 1.500 ha dan



Lembor Selatan seluas 500 ha. Potensi penanaman padi hibrida di NTT masih bagus. Kendati begitu ada banyak kendala yang kerap muncul salah satunya karena daya beli masyarakat terhadap sarana produksi masih terbatas.

“Teknologi untuk pengembangan benih padi hibrida masih terbatas dan tidak dibarengi dengan pemupukan yang seharusnya. Selain itu, pupuk subsidi di Manggarai juga masih terbatas. Sementara petani masih sangat membutuhkan pupuk untuk mendorong produksi padi di daerah ini. Akibatnya, kerap menimbulkan kesenjangan dalam pencapaian produktivitas padi. Ini salah satu penyebab perbedaan produktivitas antara yang dapat bantuan dan tidak dapat bantuan itu sangat signifikan,” jelas Kadinas Manggarai Barat.

Terkait panen, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara

Timur Yohanis Tay mengatakan, panen raya saat sekarang merupakan hasil tanam kedua pada musim tanam 2015. Dengan hasil panen padi pada areal persawahan di Lembor Kecamatan Lembor seluas 3.483 hektare Hal itu cukup mengembirakan. Untuk jenis padi hibrida, hasil panen mencapai 10,4 ton per hektare, sementara non hibrida 7,8 ton per hektare.

“Panen raya saat ini merupakan hasil tanam pada musim kedua yang dilakukan melalui program upaya khusus. Kita harus bersyukur karena ada daerah lain di NTT yang mengalami kekeringan, tetapi di wilayah lain masih bisa panen dalam jumlah yang cukup signifikan, Saya tidak ingat persis, berapa daerah di NTT yang melakukan panen pada musim kedua tahun ini. Hampir semua daerah ada panen. Memang arealnya tidak seluas di Lembor, tetapi sedikitpun ada,” kata Kadintanbun NTT.



Kementan Bantu Pembangunan Pertanian Aceh



"Pihak Kementan sangat respek dengan potensi dan prestasi sektor pertanian, terutama dalam hal produksi padi dan tanaman pangan yang selama ini dihasilkan Provinsi Aceh dan Aceh Besar. Kementan akan tetap membantu Aceh guna mendukung berbagai pembangunan di sektor pertanian, dan upaya peningkatan kesejahteraan petani"

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di masa mendatang, maka Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan menjadikan pertanian Indonesia menuju pertanian modern. Upaya menuju pertanian modern salah satunya dengan menurunkan biaya produksi yang dikeluarkan petani, demikian yang dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di sela-sela menjadi pembicara pada acara Seminar Nasional "Peluang Tantangan Petani Indonesia Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN" di Aula Fakultas Ekonomi Unsyiah Darussalam, di Banda Aceh (10/11).

Mentan menjelaskan selain melakukan penurunan biaya produksi juga akan dilakukan peningkatan produksi dan peningkatan intensitas tanam di seluruh kawasan. Dengan akumulasi dari pertanian modern tersebut nantinya akan mampu meningkatkan produksi seperti saat sekarang dimana, capaian produksi meningkat sekitar 4 juta ton lebih.

Menurut Mentan, berbagai program yang dijalankan pemerintah, termasuk dengan kebijakan yang diterbitkan, semua bermuara untuk menyejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah juga menjadikan Indonesia tidak melakukan impor beras sepanjang tahun 2015.

Mentan mengaku pihak Kementan sangat respek dengan potensi dan prestasi sektor pertanian, terutama dalam hal produksi padi dan tanaman pangan yang selama ini dihasilkan Provinsi Aceh dan Aceh Besar. Untuk itu kepada Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Besar, Mentan mengharapkan agar terus dapat



mempertahankan produksi padi dan tanaman pangan lainnya.

Lebih lanjut Mentan berjanji akan tetap membantu Aceh guna mendukung berbagai pembangunan di sektor pertanian. Kementan akan memberikan suntikan dana untuk Aceh sebanyak Rp 1 triliun pada tahun 2015. Angka tersebut bertambah dari jumlah yang diberikan sebelumnya yakni Rp 400 miliar.

"Dana sebanyak itu dipergunakan untuk membangun irigasi 59 ribu hektar, memberikan alat dan mesin pertanian, seperti traktor 1.500 unit, benih unggul, pupuk, dan sawah gratis. Inilah bentuk perhatian pemerintah saat ini.," ujar Mentan

Mentan memaparkan bukan hanya di Aceh, daerah lain juga terjadi penambahan dana. Dampak pemberian dana ini membuat Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor pada sektor pertanian setahun penuh. Jumlah produksi pangan Indonesia terus mengalami peningkatan.

"Bahkan saat ini Indonesia telah melakukan ekspor ke berbagai Negara di dunia. Seperti ekspor jagung 400 ribu ton, kacang hijau, ayam ke Myanmar, bawang

merah yang dulu impor tapi sudah diekspor empat ribu ton" papar Mentan.

Mentan berkeyakinan dengan adanya kerja keras semua stakeholder, produksi pertanian akan meningkat, untuk itu Kementan akan membantu perعتakan sawah baru mencapai 10.000 hektare di seluruh Aceh serta dukungan dalam kegiatan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian.

"Kementan akan menjadikan Aceh sebagai salah satu penyangga nasional untuk padi. Kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk membuka lahan pertanian baru seluas 10 ribu hektar di Aceh Barat. Kalau mampu 20 ribu, maka kami akan siapkan dana bantuannya," ujar Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah, memaparkan berbagai potensi pembangunan di Aceh Besar, terutama sektor pertanian dan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Pemkab Aceh Besar, sangat serius memberdayakan sektor pertanian yang merupakan salah satu andalan dalam pembangunan di Aceh Besar.



Untuk Capai Swasembada Daging Kementan Terapkan Sentra Pernakan Rakyat



"Untuk mencapai swasembada daging, maka perlu sejumlah langkah terobosan. Salah satunya dengan model pengembangan program kerja sama pengembangbiakan dan penggemukan sapi dengan pola kemitraan seperti model Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha"

Untuk dapat meningkatkan populasi sapi di Indonesia, Pemerintah berencana membuat model Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di seluruh Indonesia yang merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Untuk itu Kementerian Pertanian akan menganggarkan Rp 500 miliar, demikian disampaikan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dalam Kunjungan Kerjanya meninjau proses penggemukan di PT Great Giant Livestock (GGL) Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, (12/11).



Mentan menjelaskan untuk terbentuk Kawasan SPR maka kawasan tersebut paling tidak harus memiliki sapi betina atau indukan produktif sebanyak 1.000 ekor yang akan mampu mengembangkan peternakan dan penggemukan sapi. Bantuan yang diberikan pemerintah yakni sarana pelayanan, misalnya pusat kesehatan hewan beserta dokter hewannya.

Sedangkan untuk pembinaan, Mentan mengatakan pihak Kementan akan menunjukkan orang yang menguasai tentang bisnis persapi. Di antaranya, pembinaan mulai dari pembibitan, pemeliharaan, pakan, dan kesehatan sampai penjualan sapi hasil pembibitan. Namun, untuk anggaran tiap-tiap daerah belum dapat dipastikan besarnya. Hal itu masih tergantung dari daya serap masing-masing daerah.

Saat meninjau langsung peternakan sapi hasil kerja sama perusahaan dengan masyarakat setempat, Mentan mengaku tertarik dengan sistem yang digunakan PT Great Giant Livestock (GGL) di Lampung Tengah, Lampung. Rencananya Mentan mengundang Direktur PT. GGL bersama dinas peternakan untuk membicarakan kelanjutan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

"Kami undang nanti semuanya akan kita bahas di Jakarta. Sistem ini bagus untuk kelanjutan program Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Kita akan menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan. Toh, biaya SPR yang dianggarkan cukup besar. Dana anggaran untuk seluruh Indonesia itu ada sebesar Rp 500 miliar," ujar Mentan.

Mentan mengatakan Pemerintah akan membantu untuk kelanjutan usaha tersebut karena Pemerintah dan pengusaha harus sinergis supaya program SPR dapat berjalan lebih baik lagi.

"Program SPR terlalu berat kalau dijalankan sendiri, untuk itu kita langsung dorong sinergitas antara Pemerintah, pengusaha dan masyarakat," kata Mentan.

Terkait alat transportasi untuk ternak sapi, Mentan memaparkan Indonesia akhirnya punya kapal angkut ternak yaitu KM Camara Nusantara I. Mentan optimistis dengan adanya kapal khusus yang bisa mengangkut ternak sapi langsung dari sentra menuju Jakarta sehingga bisa menekan harga daging sapi.

"Kapal ternak sudah kita punya. Satu unit sudah selesai. Akan menyusul lima

unit lagi. Insha Allah akan menjadi enam. Janjinya lima sampai enam bulan lagi semuanya selesai. Dalam waktu dekat kami akan angkut sapi perdana dari NTT ke Jakarta," papar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa Kapal Camara Nusantara I menjadi salah satu pembuktian diaplikasikannya tol laut. Adanya kapal menjadi media untuk memotong kompas pengiriman sapi. Melalui cara tersebut, aspek biaya pun bisa ditekan.

"Kalau ini diangkut dengan harga lebih murah, bisa lebih murah juga kan harga daging, Sementara untuk penyerapan sapi, bisa dilakukan banyak pihak. Termasuk yang berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. seperti Bulog dan Berdikari" jelas Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan Pemprov Lampung siap mendukung program yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut. Hal tersebut terbukti dari keinginan kuat pemprov menjadi daerah ini berswasembada daging. "Untuk mencapai swasembada daging,



maka perlu sejumlah langkah terobosan. Salah satunya dengan model pengembangan program kerja sama pengembangbiakan dan penggemukan sapi dengan pola kemitraan,” kata Sekda Lampung.

Sementara itu, Direktur PT GGL Dayu Ariasintawati juga menjelaskan, sistem yang diterapkan GGL bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi. Melalui

program tersebut, petani diharapkan memiliki bibit sapi. Selain itu, petani diprioritaskan memiliki sapi betina kualitas baik. Sapi kualitas kurang baik akan dijadikan sapi potong.

“Sistem beternak dilakukan dengan suplai konsentrat gratis dari masyarakat. Sementara petani mensuplai makanan hijau berupa rumput setiap harinya. Saat ini, hasil anak sapi sudah memiliki nilai jual

Rp 10 hingga Rp 11 juta untuk perekornya,” jelas Direktur PT GGL.

Direktur PT GGL mengungkapkan pihaknya menyerahkan dua ekor sapi kepada masing-masing petani. Hasil ternak dibagi dua. Setelah sapi pertama melahirkan, PT GGL kembali memberi sapi, namun dalam keadaan hamil. Sementara sapi yang baru selesai melahirkan baru bisa didorong untuk hamil setelah laktasi.



Untuk Penuhi Kebutuhan Daging Kementan Kerjasama Dengan 6 Daerah Pemasok Sapi

“Kementan menjembatani distribusi sapi dari daerah penghasil daging sapi ke DKI Jakarta, karena besarnya konsumsi daging di Jakarta yang mencapai setara 720 ribu ekor sapi dalam setahun atau 60.000 ekor per bulan. Dengan penandatanganan kerjasama enam gubernur yang dilakukan bisa menjadi solusi bagi pemenuhan daging sapi di ibukota”



Mentan berharap, penandatanganan kerjasama enam gubernur yang dilakukan bisa menjadi solusi bagi pemenuhan daging sapi di ibukota. Soal angkutannya, disiapkan enam kapal khusus ternak. penyediaan 6 kapal ternak tersebut terwujud atas kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Satu unit kapal bisa mengangkut 500 ekor sapi, dengan lama pengiriman 10 hari dari wilayah terjauh yakni NTT, dan NTB. Dalam hal tersebut, Mentan telah meminta pengawalan saat proses distribusi. Mentan pun membentuk tim khusus untuk rencana tersebut.

“Kita tahu kalau DKI selalu kekurangan daging sapi. Makanya nanti kita akan buat pengiriman langsung ke Jakarta, sapi dari lima provinsi yakni NTT, NTB, Jatim, Sulsel dan Lampung. Saat ini ada enam kapal yang disediakan khusus untuk angkut sapi. Jadi, nanti sapi-sapi dari NTT, NTB dan lainnya diangkut dengan kapal itu. Ini sesuai arahan Pak Presiden yang memanfaatkan tol laut sebagai transportasi, biayanya juga lebih murah, kita mau jaga stok daging di DKI aman dan harga stabil,” ujar Mentan.

Mentan menegaskan Kementan tidak ingin proyek pengadaan sapi lokal gagal. Supaya sukses Kementan menyiapkan tim khusus mengawal lima daerah importir sapi ke DKI Jakarta. Mentan bertekad lama perjalanan kapal pengangkut 5.000 ekor sapi dari lima daerah ke ibukota Jakarta akan lebih cepat dari biasanya. Selain itu, Mentan meminta

Tingginya kebutuhan daging sapi yang tinggi di daerah Jabodetabek telah menyebabkan Pemerintah turun tangan untuk membantu pendistribusian sapi menuju Jakarta. Dalam pengadaan stok daging sapi yang akan dipasok dari beberapa daerah penghasil sapi ke DKI Jakarta, Kementerian Pertanian menggandeng enam Provinsi agar dapat menjadi daerah hinterland (penyangga) bagi DKI Jakarta dan sekitarnya dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Keenam pemasok daging sapi ke DKI Jakarta di antaranya, adalah provinsi Nusa Tenggara Timur,

Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Timur.

“Kerjasama ini dilakukan untuk memperlancar distribusi sapi diseluruh Indonesia. Semua ini untuk menstabilkan harga daging sapi dan ini bukan monopoli. Kita hanya ingin memperlancar distribusi sapi dari Provinsi NTT dan NTB yang selama ini sering kesulitan transportasi angkutan sapi untuk menuju ke Jakarta. Bila kapal angkutan ternak masih kurang, kapal bisa ditambah” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman usai penandatanganan kerjasama MoU dengan 6 gubernur terkait ketahanan pangan dan pengadaan komoditi pangan strategis termasuk angkutan sapi di Kanpus Kementerian Pertanian (13/11).



gubernur dan bupati/walikota yang menjadi daerah pemasok sapi agar mengawal bersama.

“Adanya tim khusus, pasokan sapi dari lima gubernur bisa lebih cepat tiba di DKI Jakarta, Memang normalnya dua minggu, insya Allah bisa dua hari. Makanya tim khusus pertanian turun untuk memberikan garansi. Kita ingin ubah struktur pasar, Baik jalur tol laut maupun darat, kita perlu dikawal secara bersama antara gubernur, bupati/walikota, Kementan, dan kementerian perdagangan,” tegas Mentan.

Seperti diketahui, ada lima daerah ditetapkan sebagai pemasok sapi, terdiri dari Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur maka Mentan memaparkan kerja sama dengan daerah pemasok sapi tersebut akan mengubah



struktur pasar selama ini. Mentan pun menjamin tak akan ada pihak yang bermain-main-main.

“Oleh karena itu, guna mengoptimalkan pendistribusian daging sapi, saya akan menurunkan tim khusus yang nantinya akan melakukan karantina terhadap sapi yang didistribusikan. Dengan demikian, potensi munculnya spekulasi bisa dibatasi. Nanti, saya akan turunkan tim khusus untuk memeriksa sapi selama dua sampai tiga minggu” papar Mentan.

Mentan mengungkapkan sapi yang berasal dari lima provinsi akan diangkut ke Jakarta dengan menggunakan kapal laut yang sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Nantinya kapal laut tersebut dalam sekali jalan akan mampu membawa sapi sebanyak 500 ekor. Dalam hal ini Kementan tidak hanya

memfasilitasi pengiriman sapi dari lima provinsi ke DKI Jakarta, tetapi juga akan membantu proses pemeriksaan terhadap sapi-sapi tersebut. Bahkan untuk mempercepat proses pemeriksaan Mentan memerintahkan anak buahnya untuk membentuk tim khusus. Agar pemeriksaan terhadap sapi-sapi tersebut bisa lebih cepat dari waktu normal yang biasanya memakan dua pekan.

“Kami akan mempercepat proses dari dua pekan menjadi hanya dua hari, yang menjadi permasalahan selama ini yang terjadi adalah terkait distribusi sapi, dimana pengirimannya diperiksa sampai dua minggu, karena terlalu lama proses distribusinya sehingga bukannya sapi menjadi gemuk, malah sapi itu mengalami penurunan berat badan sampai 20 persen. Kalau setiap sapi berat badannya turun sampai 20 persen, lalu dikalikan Rp 27 ribu sampai Rp 30 ribu maka Rp 6 ribu yang

dapat dihemat biaya angkutnya, tetapi kalau hilang di tengah jalan, maka harus dipangkas biayanya. Saat ini kapal angkutan ternak telah dioperasikan. Nantinya dua minggu ke depan dilepas angkutan kapal ternak perdana yang mengangkut ternak sapi dari Provinsi NTT dan NTB,” kata Mentan.

Mentan menjelaskan Kementan bekerja sama dengan distributor sapi dari NTT dan NTB, karena keduanya merupakan provinsi penghasil daging sapi, sementara Jakarta, Banten dan Jawa Barat merupakan kawasan konsumen daging sapi terbesar. Kementan menjembatani distribusi sapi dari daerah penghasil daging sapi ke DKI Jakarta, karena besarnya konsumsi daging di Jakarta yang mencapai setara 720 ribu ekor sapi dalam setahun atau 60.000 ekor per bulan. Meskipun demikian, Mentan tak dapat menjamin daerah-daerah ‘hinterland’ sapi bagi Jakarta dapat memenuhi kebutuhan konsumsi sapi.

“Kebutuhan sapi untuk wilayah jabodetabek sebanyak 60 ribu ekor per bulan dikalikan 12 bulan. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah dengan tingkat konsumsi sapi terbesar di Indonesia. Terbukti, setidaknya hampir 70 persen daging sapi impor masuk ke dalam pasar Ibu Kota dari total kebutuhan konsumsi nasional yang dipesan oleh pemerintah. Oleh karena itu masih terdapat kemungkinan pemerintah melakukan impor sapi. Tetapi Impor harus dikendalikan. Impor harus sesuai kebutuhan dalam negeri, tidak dengan keinginan. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi impor komoditi jenis ini.” jelas Mentan.



Guna Memenuhi Kebutuhan Sapi Nasional Kementan Cek Kapal Khusus Angkut Ternak

"Kementan lakukan pengecekan guna mempersiapkan sapi siap potong yang akan dikirim menggunakan kapal khusus angkutan ternak untuk memenuhi kebutuhan sapi di beberapa wilayah Indonesia. Kapal angkut nantinya lewat tol laut yang merupakan program pemerintah dan menghubungkan antar daerah dan provinsi di Indonesia"



menghubungkan antar daerah dan provinsi di Indonesia, dengan menggunakan kapal khusus angkut ternak ini, maka waktu tempuh pengiriman sapi dari NTT ke Jakarta dapat dipercepat menjadi lima hari dari yang biasanya 10 hari. Diperkirakan kapal khusus pengangkut sapi akan beroperasi mulai 1 Desember 2015 dari NTT ke DKI Jakarta.

"Keuntungan menggunakan angkutan kapal sapi ini akan menekan potensi kehilangan bobot sapi karena sapi diangkat di tempat yang layak dan tak stres. Dengan ini mudah-mudahan susut sapi bisa diamankan, karena selama ini susutnya capai 20%. Harga sapi Rp 30.000 per kg, kalau susut bobot berat badannya 20%, maka Rp 1,8 juta per ekor uang yang hilang. Jadi dengan kapal ternak khusus, 20% bisa dinikmati konsumen dan pemilik sapi," jelas Mentan.

Mentan mengakui target saat berlabuhnya kapal pengangkut sapi di Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ternyata meleset. Target semestinya diperkirakan pada 1 Desember 2015 menjadi lambat dua hari.

"Penyebabnya bermacam-macam, salah satunya karena kendala dokumen dan operasional KM Camara Nusantara I, satu dari enam kapal yang dipersiapkan pemerintah untuk mengangkut pasokan daging sapi potong ke DKI" ujar Mentan.

Mentan menegaskan nantinya pihak karantina hewan akan mempermudah proses pengiriman sapi dari NTT ke DKI Jakarta termasuk Jabodetabek. Mentan pun akan mengajak 47 pengusaha sapi untuk memanfaatkan fasilitas kapal khusus ternak ini. Pengusaha sapi hanya cukup membayar biaya angkut sapi tanpa biaya administrasi

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama (MoU) terkait pengadaan daging sapi antara Kementerian Pertanian dengan lima provinsi, yang satu diantaranya adalah Nusa Tenggara Timur. Kementerian Pertanian melakukan pengecekan terhadap kondisi sapi siap potong yang ada Nusa Tenggara Timur guna memastikan kesiapan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah pemasok sapi untuk kebutuhan nasional.

"MoU terkait pengadaan daging sapi, sudah kami laporkan ke pak Presiden dan sudah disetujui. Sedangkan pengecekan yang kami lakukan guna mempersiapkan sapi siap potong yang akan dikirim menggunakan kapal khusus angkutan ternak untuk memenuhi kebutuhan sapi di beberapa wilayah Indonesia" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di Instalasi Penampungan Karantina, Pelabuhan Tenau, Kupang (17/11).

Dalam pengecekan tersebut, Mentan didampingi oleh Gubernur Nusa

Tenggara Timur, dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir pula Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Mentan mengungkapkan sesuai arahan dan instruksi dari Presiden untuk memudahkan pengadaan sapi di Jakarta, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan guna mempersiapkan kapal khusus angkut ternak untuk memperlancar distribusi sapi dari daerah-daerah yang dijadikan pemasok sapi di Indonesia.

"Presiden telah menginstruksikan Kemenhub untuk pengadaan kapal pengangkut khusus ternak. Sebanyak enam kapal barang milik PT Pelni diubah menjadi kapal khusus angkut ternak. Saat ini, baru satu kapal yang siap beroperasi untuk mengangkut sapi, yakni KM Camara Nusantara I" ungkap Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa kapal angkut nantinya lewat tol laut yang merupakan program pemerintah dan



"Proses administrasi dan perizinan di karantina selama ini 1 minggu, sekarang 1 sampai 2 hari saya minta selesai. Begitu sapinya datang langsung selesai 2 hari dan langsung masuk kapal. Saya sebenarnya ingin agar kapal bisa datang 1 Desember. Tapi karena kendala dokumen segala macam, ya sudah tak apa-apa. Yang penting jangan datang pada 3 Desember tahun depan," tegas Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Feni Murfiani mengatakan sapi dari NTT ke DKI Jakarta diangkut dengan menggunakan kapal Camara Nusantara I yang berkapasitas sekitar 500 ekor sapi.

"Dengan menggunakan kapal ternak khusus ini, mengamankan 20%-30% bobot badan sapi hidup karena tingkat stres sapi berkurang. Biaya angkut per ekor menggunakan kapal khusus ini masih dihitung, tapi selama ini biayanya

Rp 1,2-1,4 juta per ekor," kata Direktur P2H Peternakan.

Direktur P2H Peternakan memaparkan rencananya, kapal tersebut akan melalui rute Kupang-Bima-Surabaya. Bila tak ada halangan, kapal juga akan melalui rute Cirebon. Kemudian sapi yang diturunkan di Surabaya akan diangkut ke DKI Jakarta dengan menggunakan kereta api dan truk khusus.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Danny Suhadi juga menyambut baik adanya kapal pengangkut. Dengan adanya kapal tersebut, maka biaya angkut sapi dari Nusa Tenggara Timur ke daerah lain bisa berkurang.

"Kalau sampai Jakarta itu biaya angkut per ekor pakai kapal reguler atau kapal barang butuh Rp 1,2 juta sampai Rp 1,4 juta. Biasanya satu kapal itu hanya bisa mengangkut sekitar 200-400 ekor saja,"

kata Kadinak NTT.

Kadinak NTT mengatakan sapi yang siap disediakan Nusa Tenggara Timur untuk kebutuhan nasional 57.536 ekor per tahun, sedangkan pelabuhan ternak di Nusa Tenggara Timur ada 5 titik, yaitu Kupang, Wini (pantai utara), Atapupu (Timor), Sumba (Waingapu), Flores (Reo, Flores Utara). Budidaya sapi di Nusa Tenggara Timur selama ini tidak dikandangkan tapi dilepas dengan cara budidaya tradisional.

"Dari 21 kabupaten di NTT, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Kupang penghasil sapi terbanyak. Populasi sapi di TTS 180.000 ekor dan Kabupaten Kupang 160.000 ekor. Total sapi di NTT 865.731 ekor (peternakan rakyat). Sapi dari NTT yang sudah keluar secara keseluruhan 47.436 ekor ke Kalimantan 24.000 ekor lebih Jabodetabek 20.038 ekor. Sulsel lebih kurang 1.700 ekor," kata Kadinak NTT.

Untuk Kelancaran Distribusi Sapi Kementan Lakukan Kesepakatan Dengan Pengusaha

"Kementan melakukan sejumlah kesepakatan dengan pengusaha, terkait distribusi sapi nasional. Kesepakatan pada intinya bertujuan menyederhanakan prosedur distribusi sapi dari Nusa Tenggara Timur untuk kebutuhan nasional agar berjalan lancar, cepat dan harganya lebih murah"

Dalam rangka membahas persiapan operasi kapal angkut khusus sapi untuk mendistribusikan sapi nasional serta menjamin kelancaran ketersediaan stok sapi dan tidak adanya masalah di lapangan, maka Kementerian Pertanian mengumpulkan sebanyak 47 pelaku usaha ternak sapi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui suatu pertemuan.

"Pertemuan dengan para pelaku usaha ini, guna mendengar dan menampung aspirasi para pelaku usaha sehingga masalah-masalah di lapangan, yang selama ini mempersulit pelaku usaha dapat diuraikan bersama terkait distribusi sapi dari NTT ke Jabodetabek dan wilayah lainnya" kata Menteri Pertanian saat usai pertemuan di Hotel Aston, Kupang, NTT, (18/11)

Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur NTT dan Kepala Staf Kodam IX Udayana,



Mentan menyatakan telah melakukan sejumlah kesepakatan dengan pengusaha, terkait distribusi sapi nasional. Kesepakatan pada intinya bertujuan menyederhanakan prosedur distribusi sapi dari Nusa Tenggara Timur untuk kebutuhan nasional agar berjalan lancar, cepat dan harganya lebih murah.

"Pertemuan ini dilaksanakan guna menampung aspirasi para pelaku usaha dan diharapkan permasalahan yang timbul di lapangan dapat segera terurai. Pertemuan ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan. Kita menyerap aspirasi 47 pengusaha, lalu mencari solusinya, kemudian melakukan sejumlah kesepakatan," kata Mentan

Mentan memaparkan kesepakatan tersebut di antaranya yaitu pertama, masa karantina sapi di Instalasi Karantina Hewan sebelumnya memerlukan waktu 1 hingga 2 minggu, menjadi 1 hingga 2 hari. Untuk kelancaran pasokan pemenuhan daging sapi nasional dan khususnya DKI

Jakarta maka mulai saat sekarang sistem karantina untuk sapi akan dipermudah, Kedua, adanya pemangkasan biaya penerbitan surat izin di desa.

Ketiga, Penerbitan surat izin dari kabupaten dan provinsi sebelumnya 1 hingga 2 minggu menjadi 1 hari selesai. Kemudian Keempat, biaya angkut sapi sebelumnya Rp 1,8 juta per ekor tapi dengan nanti menggunakan kapal khusus ternak menjadi Rp 320 ribu per ekor. Harga itu sudah termasuk biaya asuransi dan pakan ternak selama di kapal. Kelima, persentase kuota sapi dari NTT ke DKI Jakarta sebesar 70 persen dari total sapi yang dimiliki NTT.

Keenam, menyepakati penerbitan surat rekomendasi dari daerah penerima sebelumnya diperlukan dengan memerlukan waktu 3-4 hari, menjadi tidak diperlukan rekomendasi. Kesepakatan terakhir yakni penghapusan penerbitan surat rekomendasi dari daerah penerima.





Kesepakatan tersebut berlaku untuk memasok sapi ke PT Darma Jaya yang merupakan perusahaan daerah milik DKI Jakarta yang disubsidi pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT Frans Leburaya menyatakan bersama Kementan, Pemprov NTT berkomitmen mempercepat proses izin distribusi sapi. Gubernur NTT berjanji akan menjamin kelancaran penyediaan sapi dari NTT ke DKI Jakarta dan daerah lainnya. Caranya dengan mempermudah urusan perizinan dan administrasi lainnya dengan menjamin waktu pengurusannya selesai

dalam waktu sehari

“Kalau urusan izin dan administrasi lainnya di Propinsi NTT, saya jamin 1 hari selesai. Kami tidak akan mencari pendapatan asli daerah dari retribusi izin sapi. Masih banyak sumber lain, Di sini tidak untuk mencari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Retribusi untuk PAD bisa lewat urusan lain, Jadi kami tidak akan pernah mencari pendapatan asli daerah dari retribusi izin sapi, karena masih banyak sumber lain “ kata Gubernur NTT.

Untuk menjamin kelancaran ketersediaan

stok sapi dan tidak adanya masalah di lapangan, Gubernur NTT akan meminta para bupati untuk menertibkan retribusi yang selama ini memberatkan pelaku usaha. Tujuannya agar harga jual sapi dari pelaku usaha yang dikeluarkan ke daerah lain menjadi murah dan sapi mudah dikumpulkan.

“Pemerintah Propinsi NTT terus mendorong instalasi pembibitan ternak sapi karena kebutuhan bibit sapi di masyarakat sangat tinggi untuk menambah populasi. Di Timor ada 4 instalasi, Sumba 2 instalasi,” kata Gubernur NTT.

Gubernur NTT menjelaskan, pemerintah Propinsi NTT sejak 2008 bertekad menjadi propinsi ternak. Pemerintah Propinsi NTT terus mendorong instalasi pembibitan ternak sapi karena kebutuhan bibit sapi di masyarakat sangat tinggi untuk menambah populasi sapi.

“Sejak awal saya menjadi gubernur NTT tahun 2008, saya bertekad menjadi provinsi pemasok utama ternak sapi ke sentra konsumsi seperti Jabodetabek, dibuktikan populasi ternak sapi yang dahulu 500.000 ekor sekarang mencapai 900.000 ekor lebih” jelas Gubernur NTT.

Kementan Penuhi Kebutuhan Bawang Putih Dari Dalam Negeri

“Tembakau adalah salah satu hasil Produksi pertanian di Temanggung, namun petani di Temanggung bisa menjadikan bawang putih sebagai tanaman alternatif. Mengingat kebutuhan bawang putih dalam negeri banyak ditunjang dari impor. maka menjadi tugas penting bagi Kementan adalah memenuhi kebutuhan bawang putih dari alam Indonesia sendiri dan menekan angka impor”



Dengan besarnya volume jumlah impor bawang putih yang dikeluhkan oleh para petani di Temanggung, maka Kementerian Pertanian berkeinginan potensi komoditi bawang putih bisa dikembangkan dan mengembalikan kejayaan komoditas tanaman tersebut di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Apalagi Temanggung dulu merupakan salah satu daerah dengan potensi pertanian bawang putih.

“Saat ini kebutuhan bawang putih dalam negeri banyak ditunjang dari impor. Selama ini 95 persen kebutuhan bawang

putih harus diimpor. Tugas penting bagi Kementan adalah memenuhi kebutuhan bawang putih dari alam Indonesia sendiri dan menekan angka impor, maka kita coba tanam 100 hektare bawang putih di Temanggung,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman usai panen cabai di Desa Danupayan, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah (5/11).

Menurut Mentan semula dirinya tidak percaya bahwa bawang putih bisa menjadi komoditas pertanian yang mendominasi di daerah Temanggung. Sebab produksi pertanian di Temanggung sudah terlalu melekat dengan tembakau sebagai salah satu hasil buminya. Namun setelah mendengar langsung dari warga, Mentan

yakin betul bahwa petani di Temanggung bisa menjadikan bawang putih sebagai tanaman alternatif. Untuk itu Mentan meminta dipulihkannya kembali bawang putih lokal yang kini telah hilang dari Temanggung.

“Komoditas petani harus menjadi perhatian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka harus dikembangkan Saya penasaran, saya pikir bawang putih tidak bisa tumbuh di Indonesia. Pulihkan kembali karena budaya untuk menanam itu tidak mudah dan iklimnya juga tidak mudah. Kalau di sini iklimnya cocok. Hal ini akan menjadi perhatian serius kami Saya perintahkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk segera

meneliti potensinya. Menyiapkan bibitnya dan bagaimana kelangsungan pertumbuhannya,” kata Mentan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Wonosari, Agus Parmuji menjelaskan sebelumnya bagi petani di lereng gunung Sumbing, Sindoro dan Perahu menanam bawang putih menjadi primadona selain tembakau. Petani menanamnya usai bertanam tembakau, dengan diselingi berbagai hortikultura lain, seperti kobis, daun bawang dan bawang merah. Bawang putih dari daerah ini, dikenal dengan bawang putih tunggal atau bawang lanang (*Alium Sativum* Linn). Selain untuk bumbu dapur bawang sangatlah populer di masyarakat untuk pengobatan berbagai jenis penyakit sebab khasiatnya dua kali lipat dari pada bawang biasa

“Bawang putih asal lereng gunung Sumbing, Sindoro dan Perahu wilayah Kabupaten Temanggung hampir musnah. Komoditas hasil bumi yang menjadi primadona warga itu tersisih sejak membanjirnya bawang putih impor. Petani malas menanam dengan pertimbangan biaya yang mahal dan harga jual yang rendah. Masuknya bawang putih impor pada tahun 1995 yang harganya jauh lebih murah dibanding bawang putih lokal membuat petani enggan menanamnya karena tidak laku. Pada tahun itu harga bawang putih lokal 6.000 per kilogram, sedangkan bawang impor Rp 1.500 hingga Rp 2.250 per kilogram. Bawang putih lokal pun kalah dalam persaingan harga,” kata Kades.



Kepada Mentan, Kepala Desa Wonosari menceritakan bagaimana dulu bawang putih dapat tumbuh subur di lereng-lereng gunung Sumbing, Prau dan Sindoro. Dulu di daerahnya mempunyai lahan bawang putih luas sekali. Lereng-lereng gunung yang di atas permukiman warga itu bawang putih semua. Sementara yang bawah ditanami jagung. Namun hal itu hanya berlangsung sampai tahun 1995. Gempuran bawang impor yang lebih murah yaitu Rp 1.500 hingga Rp 2.250 per kilogram lebih menang di pasaran. Sementara bawang lokal harganya Rp 6.000 per kilogram.

“Konsumen lebih memilih bawang impor dengan harga jauh lebih murah dan berukuran besar. Padahal bawang lokal secara kualitas lebih unggul. Bawang lokal lebih kuat dalam rasa dan harum aromanya. Kondisi tersebut lantas berimbas pada semakin minimnya petani

bawang lokal. Selain kalah di pasaran, bawang putih lokal juga mahal biaya produksinya dengan kelangkaan bibit. Hingga 2002 lantas petani telah benar-benar menyerah dan tak lagi sanggup bertani bawang putih” ujar Kades.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Kabupaten Temanggung, Masrik Amin juga mengatakan biasanya dulu petani menanam bawang putih di kawasan lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Perahu setelah panen tembakau.

“Waktu itu lahan tanaman bawang putih sempat mencapai 1.500 hingga 2.000 hektare, namun karena kalah bersaing dengan bawang putih impor petani enggan menanam. Mulai tahun 2002 tidak ada lagi petani yang menanam bawang putih karena bibit terlalu mahal dan langka,” imbuh Kadistan



Untuk Angkat Citra Indonesia Kementan Gelar Festival Hortikultura 2015

“Diselenggarakannya Festival Hortikultura untuk memasyarakatkan hortikultura nusantara kepada seluruh kalangan. Potensi hortikultura yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, florikultura dan tanaman obat sangat besar sehingga layak untuk dikembangkan untuk pemenuhan pasar domestik, ekspor, pariwisata maupun untuk mengangkat citra Indonesia di dunia Internasional”

Festival Hortikultura merupakan agenda tahunan nasional untuk memasyarakatkan hortikultura nusantara kepada seluruh kalangan. baik pelajar, mahasiswa, petani, ibu rumah tangga dan seluruh pelaku usaha hortikultura serta pemangku kepentingan terkait, demikian yang dikatakan Menteri

Pertanian, Amran Sulaiman dalam sambutan tertulisnya pada pembukaan Festival Hortikultura di Mataram-NTB pada 10 Oktober 2015.

Sesuai Tema Festival Hortikultura 2015 yaitu “Menduniakan Hortikultura, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia” maka Festival hortikultura diharapkan dapat menarik investasi, sosialisasi teknologi

komunikasi dan tukar menukar informasi antar pelaku usaha hortikultura meningkatkan kompetensi para pelaku usaha hortikultura yang kesemuanya itu ditujukan untuk memperbaiki produksi, produktivitas dan kualitas hortikultura nusantara.



Dalam Festival Hortikultura dilakukan lomba varietas dan lomba produk unggulan hortikultura dari berbagai provinsi dan Kab/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan varietas unggul yang disukai oleh pasar dan akan dikembangkan secara komersial. Potensi hortikultura yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, florikultura dan tanaman obat sangat besar sehingga layak untuk dikembangkan untuk pemenuhan pasar domestik, ekspor, pariwisata maupun untuk mengangkat citra Indonesia di dunia Internasional.

Mengingat Neraca perdagangan hortikultura tahun 2014 mengalami defisit sebesar US\$ 1.176 juta setara Rp. 11,76 triliun. Kondisi defisit neraca perdagangan hortikultura terutama terjadi pada kelompok komoditas buah dan sayur, sementara pada tanaman obat dan tanaman hias menunjukkan surplus perdagangan. Buah-buahan manggis dan mangga menjadi penyumbang ekspor terbesar, sedangkan untuk kelompok sayuran adalah kol, tomat dan kentang. Sebaliknya, buah-buahan yang banyak diimport adalah durian dan jeruk, dan untuk kelompok sayuran adalah bawang putih, bawang merah, kentang dan wortel. Dengan memperhatikan data tersebut Mentan memerintahkan Dirjen Hortikultura untuk bekerja lebih keras lagi untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor hortikultura dengan cara menghasilkan produk-produk hortikultura yang berdaya saing tinggi.

Sebagaimana perintah Presiden, Kementan harus dapat mewujudkan swasembada untuk tujuh komoditas utama yaitu padi jagung, kedelai, daging sapi, gula, cabai dan bawang merah. Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus serius dalam mewujudkan swasembada pangan tersebut. Untuk itu, Kementan sudah tidak mengijinkan lagi untuk mengimpor bawang merah segar mulai tahun 2016. Potensi Indonesia untuk menghasilkan bawang merah sangat besar. mulai dari Aceh sampai Merauke dapat ditanami bawang merah dan bawang merah dapat ditanam sepanjang tahun. Target tahun 2016 Indonesia harus mengekspor bawang merah dalam jumlah yang lebih besar. Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten Bima dan Sumbawa memiliki potensi yang sangat besar untuk bertanam bawang merah sepanjang tahun, sehingga dapat dijadikan andalan dalam penyediaan bawang merah nasional. Pemerintah pusat akan terus membantu pengembangan bawang merah di provinsi ini.

Untuk cabai tantangan yang dihadapi



adalah bertanam di musim kemarau dan diproduksi pada saat musim hujan. Untuk itu program pemerintah adalah membantu ketersediaan air untuk pertanaman pada musim kemarau dan memperkenalkan penggunaan shading net agar saat musim hujan bunga cabai tidak rontok terlalu banyak. Tantangan bagi Litbang dan produsen benih adalah menghasilkan varietas yang tahan ditanam di musim kemarau dan produktivitasnya tinggi saat dipanen di musim hujan. Agar harga cabai tidak berfluktuasi tajam, kita harus menerapkan pola tanam yang baik sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan produksi di bulan-bulan tertentu. Di sini peran Dinas Pertanian untuk mengajak petani mentaati pola tanam sangat penting.

Untuk komoditas buah-buahan, saat sekarang Indonesia tercatat sebagaieksporir nanas olahan terbesar di dun1a dengan konsentrasi kawasan di Provinsi Lampung. Kita juga unggul dalam hal ekspor buah - buahan eksotik seperti manggis, salak dan mangga. Pertumbuhan nilai ekspor buah-buahan tersebut meningkat dari tahun 2010 sampai 2013 rata-rata sebesar 13,61 %. Oleh karena itu Saya minta Dirjen Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas buah yang dihasilkan petani untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Apabila dicermati dalam beberapa dekade terakhir ini produksi hortikultura terus mengalami peningkatan baik dari kuantitas maupun kualitas, sebagai dampak dari penerapan GAP (Good Agricultural Practices) dalam usaha budidaya hortikultura. Produk hortikultura kedepan bukan saja harus semakin beriiUalitas dan kontinuitas pasokannya terjamin, akan tetapi juga harus diusahakan dengan memperhatikan sistem pelestarian

Dan berbagai pengalaman empiris, disimpulkan bahwa pengembangan usaha hortikultura harus dilakukan dengan pendekatan industri. Melalui pendekatan ini kita berharap daya saing produk hortikultura meningkat berkat kecermatan dan ketepatan dalam memilih jenis dan ragam komoditas yang sesuai dengan permintaan pasar. Produk hortikultura dalam negeri terkesan dengan pasokan yang tidak stabil dan mutu yang belum terstandar. Oleh karena itu penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP) disertai dengan pemberdayaan kelembagaan petani, penguatan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan dikelola secara terintegrasi diharapkan mampu menjadi kekuatan besar bagi hortikultura untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

Mentan merasa gembira akan keterlibatan banyak pihak dalam Festival Hortikultura. Mentan mengharapkan dapat mewujudkan sinergi konkrit dalam mewujudkan industri hortikultura yang unggul. Untuk itu Saya mengharapkan kegiatan ini akan berlanjut pada tahun - tahun mendatang pada tempat yang berbeda agar setiap daerah dapat menampilkan hortikultura unggulan yang dimilikinya. Begitu juga dengan penyelenggaraan yang berganti tempat setiap tahunnya tentu akan membawa dan memperluas wawasan pengetahuan banyak pihak di berbagai wilayah berbeda. Dengan banyaknya perlombaan di bidang hortikultura, akan lebih banyak lagi pilihan varietas unggul yang tersedia untuk ditanam oleh petani dan dinikmati oleh konsumen dan Bangsa Indonesia dapat meningkatkan kecintaannya pada produk hortikultura Nusantara.







Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
BIRO UMUM DAN HUMAS
Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan
Telp./Fax. (021) 780 4457

humas@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

